

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, New Public Management, Kompetensi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

Deliana Permata Hati¹, Suhesti Ningsih², M. Hasan Ma'ruf³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

delianapermata1317@gmail.com¹, hesti.hegi@gmail.com², hasan.stie.aas@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Hati, D. P., Ningsih, S. & Ma'ruf, M. H., (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, New Public Management, Kompetensi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 717-726.

Abstract: *This study aims to examine the effect of internal control systems, new public management, competence, and individual morality on fraud prevention in village financial management. A quantitative approach was employed, with primary data collected through questionnaires distributed to village officials in 18 villages in Wonosari District, Klaten Regency. A total of 52 respondents were selected using purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 23. The findings reveal that internal control systems and individual morality have no significant effect on fraud prevention. In contrast, new public management and competence show a positive and significant influence on fraud prevention. These results highlight the crucial role of adopting modern public management principles and enhancing the competence of village officials in strengthening accountability and preventing fraud in local financial governance.*

Keywords: *Internal Control System, New Public Management, Competence, Individual Morality, Fraud Prevention.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, new public management, kompetensi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa pada 18 desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan jumlah responden 52 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Sebaliknya, new public management dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen publik modern serta peningkatan kompetensi aparatur desa dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, New Public Management, Kompetensi, Moralitas Individu, Pencegahan Fraud.*

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.



Hal ini sejalan dengan amanat PMK No. 201/PMK.07/2022 yang menegaskan bahwa dana desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan anggaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa dana desa merupakan salah satu pos anggaran yang paling rentan terhadap fraud atau kecurangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan laporan keuangan, pengadaan fiktif, maupun korupsi langsung oleh aparat desa.

Kasus korupsi yang terjadi di Desa Trunuh, Klaten pada periode 2020–2021 oleh bendahara desa, yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi (Prakoso & Suharsih, 2023), menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas aparatur desa. Kasus ini bukanlah satu-satunya, tetapi mencerminkan pola yang berulang di banyak daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud pada level desa sangat penting untuk diperkuat, baik dari aspek kelembagaan maupun individu.

Salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya fraud adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017), pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode, dan prosedur yang terkoordinasi untuk melindungi aset, memastikan keandalan data akuntansi, serta mendukung kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Islamiyah et al. (2020) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah, sehingga efektivitas sistem pengendalian internal di desa masih perlu dikaji lebih dalam (Sa'diyah, 2023).

Selain itu, pendekatan New Public Management

(NPM) menjadi konsep yang relevan dalam memperbaiki tata kelola sektor publik. NPM menekankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan praktik manajemen sektor swasta dalam administrasi publik (Mahmudi, 2015). Penerapan prinsip NPM terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mengurangi peluang terjadinya fraud (Jultri et al., 2021; Hamid et al., 2020). Namun, implementasi NPM pada level desa relatif masih terbatas dan belum banyak diteliti, sehingga menjadi celah penelitian yang penting.

Dari sisi sumber daya manusia, kompetensi aparatur desa sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Sutrisno (2015), kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung individu dalam melaksanakan tugas secara efektif. Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu menjalankan pengelolaan keuangan dengan benar dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Penelitian Islamiyah et al. (2020) dan Sa'diyah (2023) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sementara studi lain menemukan pengaruh yang bervariasi tergantung konteks organisasi.

Di samping itu, faktor moralitas individu juga menjadi aspek penting dalam pencegahan fraud. Moralitas berhubungan dengan nilai etis, integritas, serta kemampuan seseorang membedakan benar dan salah (Yulianti, 2016). Penelitian Radi et al. (2023) serta Harry Krishna Mulia et al. (2017) menegaskan bahwa moralitas individu berhubungan negatif dengan kecenderungan fraud; semakin tinggi moralitas, semakin rendah kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan moralitas tidak selalu berpengaruh signifikan karena faktor eksternal seperti tekanan lingkungan dan lemahnya



penegakan aturan sering kali lebih dominan (Taringan, 2016).

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud masih diperdebatkan, terutama di konteks desa yang struktur pengawasannya relatif sederhana. Kedua, implementasi NPM di level desa masih minim dikaji, padahal desa merupakan unit pemerintahan yang mengelola dana dalam jumlah besar. Ketiga, meskipun kompetensi dianggap penting, penelitian tentang hubungan kompetensi aparatur desa dengan pencegahan fraud masih terbatas. Keempat, hasil penelitian tentang moralitas individu juga belum konsisten; ada studi yang menyatakan signifikan, tetapi ada juga yang menolak hipotesis tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh sistem pengendalian internal, new public management, kompetensi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur mengenai fraud prevention di sektor publik, khususnya pada level pemerintahan desa yang relatif kurang diteliti. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam memperkuat akuntabilitas serta mencegah kecurangan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, implementasi prinsip-prinsip NPM, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan moralitas individu.

2. Tinjauan Teoritis

Fraud atau kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, serta berpotensi merugikan organisasi maupun masyarakat luas. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud mencakup berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan

aset, dan kecurangan laporan keuangan. Teori yang paling sering digunakan untuk menjelaskan perilaku fraud adalah Fraud Triangle Theory yang dikembangkan oleh Donald Cressey (1953). Teori ini menegaskan bahwa seseorang terdorong melakukan fraud karena tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, ketiga faktor tersebut dapat muncul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya moralitas aparatur, serta adanya kebutuhan atau tekanan ekonomi pribadi.

Salah satu faktor penting dalam mencegah fraud adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017), pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan keandalan laporan keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat meminimalkan peluang terjadinya kecurangan karena setiap transaksi dan keputusan keuangan melewati mekanisme verifikasi dan pengawasan. Penelitian Candrarini & Asih (2019) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud pada lembaga keuangan mikro. Hal yang sama ditemukan oleh Islamiyah et al. (2020) yang menegaskan bahwa pengendalian internal berkontribusi signifikan dalam pencegahan fraud di pengelolaan dana desa. Namun, penelitian lain seperti Eliza (2015) menemukan hasil yang berbeda, bahwa sistem pengendalian internal tidak selalu efektif karena seringkali hanya bersifat administratif tanpa implementasi yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada komitmen aparatur desa dalam menerapkannya.

Selain pengendalian internal, faktor kelembagaan yang juga penting adalah penerapan New Public Management (NPM). Konsep NPM muncul sebagai paradigma baru dalam administrasi publik yang mengadopsi



prinsip manajemen sektor swasta, dengan penekanan pada efisiensi, akuntabilitas, kinerja, serta orientasi pada kepuasan publik (Mahmudi, 2015). Menurut Puspawati (2016), penerapan NPM di Indonesia menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian Jultri et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan NPM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat memperkecil peluang terjadinya fraud. Selain itu, penelitian Hamid et al. (2020) menegaskan bahwa NPM dapat menjadi variabel mediasi yang menghubungkan kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan dengan kinerja aparatur pemerintah. Dengan demikian, NPM bukan hanya sekadar konsep administratif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penguatan tata kelola sektor publik yang lebih bersih dan transparan.

Dari perspektif sumber daya manusia, kompetensi merupakan faktor kunci yang memengaruhi integritas pengelolaan keuangan. Sutrisno (2015) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung individu dalam melaksanakan tugas secara efektif. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu memahami regulasi, menyusun laporan keuangan yang akurat, dan menghindari praktik yang merugikan organisasi. Penelitian Sa'diyah (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, karena individu dengan kompetensi tinggi cenderung lebih memahami risiko hukum dan etika. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, bersama dengan budaya organisasi yang etis, berpengaruh signifikan dalam menurunkan kecenderungan fraud di lembaga keuangan desa. Namun demikian, Wonar et al. (2018) menekankan bahwa kompetensi saja tidak cukup tanpa adanya moralitas dan kepekaan etis, karena individu yang

kompeten juga berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk melakukan manipulasi.

Selain aspek kompetensi, moralitas individu juga menjadi faktor yang sering dibahas dalam literatur fraud prevention. Menurut Yulianti (2016), moralitas individu merupakan seperangkat nilai dan prinsip etis yang membimbing perilaku seseorang dalam membedakan benar dan salah. Aparatur dengan tingkat moralitas yang tinggi akan lebih cenderung menolak tindakan kecurangan meskipun ada peluang. Penelitian Mulia et al. (2017) menemukan bahwa moralitas individu memiliki hubungan negatif dengan kecenderungan melakukan fraud; semakin tinggi moralitas, semakin kecil kemungkinan individu melakukan penyimpangan. Penelitian Radi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa moralitas yang kuat dapat memperlemah dorongan rasionalisasi dalam fraud triangle. Namun demikian, penelitian Taringan (2016) menemukan bahwa moralitas individu terkadang tidak cukup kuat menahan dorongan fraud ketika terdapat tekanan ekonomi tinggi atau lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, moralitas harus berjalan seiring dengan pengendalian internal dan budaya organisasi yang sehat.

Jika dikaitkan dengan teori fraud, maka variabel sistem pengendalian internal berkaitan erat dengan elemen opportunity dalam Fraud Triangle. Pengendalian yang lemah memberi peluang lebih besar bagi individu untuk melakukan kecurangan (ACFE, 2016; Mulyadi, 2017). Variabel New Public Management (NPM) berhubungan dengan aspek rationalization, karena penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi kinerja dapat mempersempit ruang pembenaran bagi tindakan fraud (Mahmudi, 2015; Jultri et al., 2021). Sementara itu, kompetensi dan moralitas individu berhubungan dengan aspek pressure maupun rationalization. Individu yang kompeten memiliki



pemahaman profesional untuk menolak tekanan eksternal, sementara individu yang bermoral tinggi lebih mampu menghindari pembenaran atas tindakan curang (Yulianti, 2016; Radi et al., 2023; Harry Krishna Mulia et al., 2017). Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1. *Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.*
- H2. *New Public Management berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.*
- H3. *Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.*
- H4. *Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, new public management, kompetensi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan kausal antarvariabel melalui analisis statistik (Sugiyono, 2014).

Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa di 18 desa yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Dari populasi tersebut, ditentukan sampel sebanyak 52 responden menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti hanya melibatkan responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu perangkat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan, pencatatan, atau pengawasan keuangan desa. Jumlah sampel tersebut dianggap memadai karena memenuhi ketentuan analisis regresi, yakni minimal 5–10 kali jumlah variabel penelitian (Hair et al., 2010).

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Variabel sistem pengendalian internal diukur menggunakan indikator lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Pavitasari, 2018; PP No. 60 Tahun 2008). Variabel *new public management* diukur melalui indikator orientasi kinerja, teknik controlling, penerapan prosedur akuntansi, audit keuangan, orientasi sumber daya pada output, serta sistem penghargaan dan hukuman (Jultri et al., 2021). Variabel kompetensi diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Pavitasari, 2018). Variabel moralitas individu diukur melalui indikator amanah, kesesuaian, tanggung jawab, keteraturan, dan ketepatan waktu (Febriani, 2020). Sementara itu, variabel pencegahan fraud sebagai variabel dependen diukur berdasarkan konsep Fraud Triangle Theory yang mencakup aspek tekanan, peluang, dan rasionalisasi (ACFE, 2016).

Sebelum dilakukan analisis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan dapat mengukur variabel yang dimaksud, dengan kriteria nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan ketentuan nilai lebih dari 0,70 menunjukkan instrumen reliabel. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta uji hipotesis. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara simultan, sementara uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel



independen terhadap variabel dependen. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05.

Berdasarkan kerangka teori dan hipotesis yang telah dikembangkan, penelitian ini membangun model empiris sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

keterangan:

Y = Pencegahan Fraud

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = *New Public Management*

X3 = Kompetensi

X4 = Moralitas Individu

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

ε = Error

Model ini menggambarkan bahwa pencegahan fraud dipengaruhi secara simultan maupun parsial oleh sistem pengendalian internal, penerapan *new public management*, kompetensi, dan moralitas individu aparatur desa.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis data dari 52 responden yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji F, uji t, serta koefisien determinasi. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Data

Analisis	Hasil Uji	Kesimpulan
Statistik Deskriptif	Responden: 75% laki-laki, 25% perempuan; Usia mayoritas 51–60 tahun (42,3%); Pendidikan mayoritas D3/S1 (57,7%)	Karakteristik responden cukup beragam dan representatif.
Uji Validitas	Semua item pertanyaan memiliki r hitung > r tabel (0,2681)	Instrumen valid
Uji Reliabilitas	Cronbach's Alpha >	Instrumen

	0,70 untuk semua variabel	reliabel
Uji Normalitas	Sig. Kolmogorov-Smirnov = 0,077 > 0,05	Data terdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 untuk semua variabel	Tidak ada multikolinearitas
Regresi Linier Berganda	Persamaan: $Y = 15,128 - 0,069X_1 + 0,282X_2 + 0,272X_3 - 0,073X_4 + e$	New Public Management (X2) dan Kompetensi (X3) berpengaruh positif; Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Moralitas Individu (X4) tidak berpengaruh
Uji F (Simultan)	Fhitung = 19,541; Ftabel = 2,550; Sig. = 0,000 < 0,05	Model regresi layak digunakan
Uji t (Parsial)	X1: Sig. 0,546 (>0,05) → Tidak signifikan; X2: Sig. 0,002 (<0,05) → Signifikan; X3: Sig. 0,005 (<0,05) → Signifikan; X4: Sig. 0,273 (>0,05) → Tidak signifikan	H2 & H3 diterima; H1 & H4 ditolak
Koefisien Determinasi (R^2)	Adjusted $R^2 = 0,593$	Variabel independen menjelaskan 59,3% variasi pencegahan fraud; sisanya 40,7% dipengaruhi faktor lain

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan dengan tingkat signifikansi yang baik (uji F). Secara parsial, *New Public Management* (X2) dan Kompetensi (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin baik penerapan prinsip manajemen publik modern serta semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin kuat



pula upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebaliknya, variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Moralitas Individu (X4) tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengendalian internal dan moralitas individu penting secara teoretis, dalam praktiknya di desa Wonosari efektivitasnya masih lemah. Kemungkinan hal ini disebabkan karena sistem pengendalian internal hanya bersifat administratif dan belum dijalankan secara konsisten, sementara moralitas individu belum cukup kuat menahan pengaruh lingkungan atau peluang melakukan kecurangan.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,593 menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 59,3% variasi pencegahan fraud, sedangkan sisanya 40,7% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau peran *whistleblowing system*.

Temuan ini menarik karena secara teori keempat variabel tersebut seharusnya berkontribusi terhadap pencegahan fraud, namun dalam praktik di tingkat desa terdapat dinamika yang berbeda. Pertama, hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Secara teoritis, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme organisasi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan, sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadi (2017) dan Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2013 dalam Hayes, 2017). Penelitian terdahulu juga banyak menunjukkan hubungan positif, misalnya penelitian oleh Candrarini & Asih (2019) dan Islamiyah et al. (2020) yang membuktikan bahwa pengendalian internal mampu menekan kecenderungan kecurangan. Namun, hasil berbeda muncul pada penelitian ini, yang justru sejalan dengan temuan Eliza (2015) bahwa pengendalian internal tidak selalu efektif karena implementasinya sering bersifat administratif dan hanya formalitas. Hal ini mungkin terjadi karena pada konteks desa,

pengendalian internal belum diterapkan secara konsisten dan lebih banyak dipandang sebagai kewajiban administratif ketimbang instrumen pencegahan yang nyata. Dengan demikian, peluang terjadinya fraud tetap terbuka meskipun dokumen pengendalian internal tersedia.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa New Public Management berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini sesuai dengan pandangan Mahmudi (2015) bahwa NPM menekankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta orientasi pada hasil. Implementasi prinsip NPM di desa berarti bahwa tata kelola keuangan desa tidak hanya mengikuti aturan prosedural, tetapi juga diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Hasil penelitian ini memperkuat studi Jultri et al. (2021) dan Hamid et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan NPM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menekan kecenderungan kecurangan. Dalam konteks desa, adopsi NPM berkontribusi pada budaya kerja yang lebih modern dan akuntabel, sehingga menutup ruang rasionalisasi bagi individu yang berniat melakukan fraud. Hal ini sesuai dengan Fraud Triangle Theory, di mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas mempersempit peluang rasionalisasi tindakan kecurangan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional cenderung lebih memahami konsekuensi hukum dan etika dalam pengelolaan keuangan, sehingga lebih kecil kemungkinan terlibat dalam fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sa'diyah (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian lain oleh Pratiwi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan budaya etis organisasi dapat menurunkan risiko fraud di lembaga keuangan. Sebaliknya, aparatur desa



yang kurang kompeten akan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan mengelola dana secara transparan, sehingga berpotensi membuka celah kecurangan. Temuan ini menegaskan pentingnya program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi akuntabilitas publik.

Keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Yulianti (2016), Harry Krishna Mulia et al. (2017), dan Radi et al. (2023) yang menegaskan bahwa moralitas individu berhubungan negatif dengan kecenderungan fraud. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa meskipun individu memiliki moralitas tinggi, faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, atau adanya tekanan ekonomi dapat mengaburkan nilai moral tersebut. Penelitian Taringan (2016) juga menemukan bahwa moralitas individu tidak cukup kuat untuk menahan dorongan fraud ketika terdapat tekanan tinggi atau peluang besar. Dalam konteks desa, moralitas individu sering kali kalah oleh budaya kolektif, kepentingan pribadi, atau peluang kecurangan yang tidak diimbangi oleh sistem pengawasan yang ketat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pencegahan fraud lebih efektif dipengaruhi oleh faktor kelembagaan seperti penerapan New Public Management dan faktor kemampuan individu berupa kompetensi, dibandingkan faktor administratif (sistem pengendalian internal) maupun nilai personal (moralitas). Hal ini memiliki dampak praktis yang penting. Pertama, pemerintah desa perlu lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip NPM dalam tata kelola keuangan, misalnya melalui transparansi anggaran, pelaporan berbasis kinerja, serta mekanisme audit independen. Kedua, peningkatan kompetensi aparatur desa harus menjadi prioritas, misalnya dengan pelatihan

reguler, penguatan literasi keuangan, dan rekrutmen berbasis merit. Ketiga, hasil penelitian ini juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan eksternal, karena sistem internal belum efektif dalam mencegah fraud.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkaya literatur empiris yang menunjukkan adanya perbedaan hasil antara teori dan praktik di lapangan. Fraud Triangle Theory menekankan tiga faktor utama penyebab fraud, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (ACFE, 2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesempatan (pengendalian internal) dan nilai moral (rasionalisasi) tidak berpengaruh signifikan, aspek kelembagaan (NPM) dan kapasitas individu (kompetensi) justru lebih dominan dalam mencegah fraud di desa. Dengan demikian, teori Fraud Triangle dapat diperluas dengan mempertimbangkan konteks organisasi publik di tingkat desa, di mana faktor kelembagaan dan kompetensi menjadi determinan utama pencegahan fraud.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa new public management dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen publik modern serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sebaliknya, sistem pengendalian internal dan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengendalian internal dan moralitas penting secara teoretis, implementasinya di tingkat desa belum cukup kuat untuk mencegah kecurangan tanpa didukung kelembagaan yang akuntabel dan aparatur yang kompeten.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan fraud di desa lebih ditentukan



oleh faktor kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dibandingkan faktor administratif maupun moral personal semata.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif kecil sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi luas. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada sistem pengendalian internal, new public management, kompetensi, dan moralitas individu, sementara faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan whistleblowing system belum dianalisis. Selain itu, penggunaan kuesioner berpotensi menimbulkan bias subjektif dari responden.

Untuk penelitian mendatang, disarankan memperluas sampel ke wilayah lain dan menambahkan variabel yang lebih beragam agar hasil lebih komprehensif. Pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif juga dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika pencegahan fraud. Secara praktis, pemerintah desa perlu memperkuat implementasi prinsip New Public Management, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat pengawasan eksternal. Pembinaan etika dan integritas aparatur juga penting untuk menumbuhkan budaya tata kelola yang bersih dan akuntabel.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, serta seluruh aparatur desa di Kecamatan Wonosari yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Dukungan dan kontribusi semua pihak sangat membantu terselesaikannya artikel ini.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2016). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Candrarini, G., & Asih, P. (2019). Internal control toward accounting fraud tendency at whole BMT. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 3534–3539.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.24843/EJA>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, H., Haming, M., Semmaila, B., & Bijang, J. (2020). A mediation effect of new public management on the relationship between intelligence, leadership, HR quality and performance of local government employees in Indonesia. *Management Science Letters*, 10(7), 1401–1408. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.12.034>
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-prinsip Pengauditan (International Standards on Auditing)* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13
- Jultri, A., Made, A., & Wirshandono, D. Y. (2021). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan New Public Management terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Studi pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 9(1), 1–13.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulia, M. H. K., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecurangan: Sebuah studi eksperimental. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 182–194. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>



- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Pavitasari, E. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Tesis). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratiwi, A. A. M., Mertha, M., & Suryanawa, I. K. (2023). The influence of internal control, human resources competence, and organizational ethical culture on the tendency of accounting fraud in LPD Badung Regency. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5086–5099. <https://doi.org/10.54443/msej.v4i5.1053>
- Radi, S., Rina, & Pratiwi, H. (2023). Pengaruh efektivitas pengendalian dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bappeda Kota Parepare. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 1–14.
- Sa'diyah, N. (2023). *Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan moralitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa* (Tesis). Universitas Islam Malang.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2015). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi ke-7). Jakarta: Kencana.
- Taringan, L. B. (2016). Pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi pada BUMD Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 3(1), 896–909.
- Yulianti, F. D. (2016). Pengaruh moralitas individu, penegakan hukum, keadilan distributif, dan keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening (Studi pada SKPD Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 2177–2191.

